

PERLINDUNGAN ANAK - PEMENUHAN HAK ANAK - DESA LAYAK ANAK
2023

PERDA KAB. SAMBAS NO.1, LD 2023/NO. 1, 39 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA).
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:
 1. Ketentuan umum;
 2. Maksud, tujuan, dan prinsip Kabupaten Layak Anak;
 3. Hak dan kewajiban anak;
 4. Indikator Kabupaten Layak Anak;
 5. Tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 6. Kelembagaan Kabupaten Layak Anak;
 7. Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa;
 8. Kemitraan Kabupaten Layak Anak;
 9. Tanggung jawab orang tua dan keluarga;
 10. Partisipasi masyarakat;
 11. Tanggung jawab dunia usaha;
 12. Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak;
 13. Pendanaan;
 14. Sanksi administratif;
 15. Ketentuan peralihan; dan
 16. Ketentuan penutup.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagai lembaga koordinatif yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, forum anak, dan media massa. Selain itu diatur pula kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan data anak terpilah, penganggaran pemenuhan hak anak, penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, serta evaluasi pelaksanaan KLA secara berkala.
 - Peraturan Daerah ini juga mengatur partisipasi masyarakat, keluarga, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, termasuk penyediaan

fasilitas ramah anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, pencegahan perkawinan anak, serta pengembangan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

- Catatan :
- Mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
 - Terdiri atas 51 Pasal.
 - Penjelasan terdiri dari 12 halaman.